

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI
DAERAH DALAM MEMPEROLEH PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI KABUPATEN SUPIORI
PROVINSI PAPUA**



ARI YOHAN WAMBRAUW

No. Mhs: 115201723/PS/MIH

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2013**



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : ARI YOHAN WAMBRAUW
Nomor Mahasiswa : 115201723/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul Tesis : Eefektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Perpajakan dan Retribusi Daerah dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Supiori Provinsi Papua

Nama Pembimbing

Tanggal

Tanda Tangan

Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum

29/7/2013

Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum

30/07/2013



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : ARI YOHAN WAMBRAUW
Nomor Mahasiswa : 115201723/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul Tesis : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Perpajakan dan Retribusi Daerah Dalam Memperoleh Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Supiori Provinsi Papua

Nama Pembimbing

Tanggal

Tanda Tangan

Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.

29/7/2013

Ketua

Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.

30/07/2013

Anggota

Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M

30/07/2013

Anggota

Ketua Program Studi

B. Bambang Riyanto, SH., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa tesis dengan Judul **Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Perpajakan dan Retribusi Daerah Dalam Memperoleh Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Supiori Provinsi Papua**, merupakan karya asli Penulis dan bukan merupakan hasil plagiarisme. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya secara jelas sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang bertentangan dengan tesis ini maka, penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Juli 2013

Penulis,



Ari Yohan Wambrau

INTI SARI

Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan Negara Indonesia, antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna mencapai tujuan tersebut, maka, melalui pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, negara memerlukan beberapa unsur pendukung salah satunya adalah tersedianya sumber-sumber penerimaan yang memadai. Sumber-sumber penerimaan ini sangat penting untuk menjalankan kegiatan pada masing-masing tingkat pemerintahan, karena tanpa adanya penerimaan yang cukup maka program-program pemerintahan tidak akan berjalan secara maksimal. Semakin luas wilayah, semakin besar jumlah penduduk, semakin kompleks kebutuhan masyarakat maka akan semakin besar pula dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Tentu Negara pasti akan kewalahan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tersebut tanpa adanya dukungan pembiayaan oleh daerah itu sendiri.

Guna untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di segala bidang, yang pada dasarnya diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka daerah diharapkan dapat ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah daerahnya sendiri sesuai konsep desentralisasi fiskal. Namun tidak dapat diwujudkan hal tersebut kalau daerah tidak mengoptimalkan efektivitas perangkat hukum khususnya Peraturan Daerah tentang Perpajakan dan Retribusi Daerah. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan dan retribusi daerah bahwa Pajak dan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Supiori, belum berhasil dalam mengintensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah yang diandalkan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah perpajakan dan retribusi daerah oleh karena obyek-obyek pajak dan retribusi daerah yang diatur dalam peraturan-peraturan dimaksud tidak sinkron dengan potensi sumberdaya yang dimiliki daerah.

Kata Kunci : Efektivitas, Peraturan Daerah, Perpajakan dan Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT

The Preamble of Constitution 1945 entrusts that the any purpose of Indonesia is to provide public welfare and make educated and literate nations. To reach the aim, then through the governmental and development tasks performance, the state needs some supporting elements and one of them is the availability of adequate sources acceptance. This acceptance is very important for the performance of all activities in every stage of governing bodies. If there is no adequate acceptance then the programs from the governing bodies will never run maximum. The wider the state, the higher the numbers of citizens, and the more complex the need of those citizens so the fund needed for performing government and development will be higher as well. This will certainly burden the state to finance the government and development conduct and expenses without the support from the local governments.

To perform government and development activities in all fields, which are basically intended to improve the public welfare, then the local governments are suggested to be able to make intensification and intensification on their Original Local Income based on fiscal decentralization concepts. Nevertheless, that effort will never be able to be realized if the local governments not to optimize the effectiveness of the body of law especially of Local Government Legislation on Local Tax and Retribution. Based on the determination of regulation on Local Tax and Retribution is determined by Local Government Regulation.

The Government of Supiori Regency has not worked the intensification of the local income from superior resources as is determined and entrusted by the Local Government Legislation on Local Tax and Retribution since the objects of those local tax and retribution as stated in the regulation is not synchronized within the potents of the resources in its area.

Key words: Effectivity, Local Government Legislation, Local Tax and Retribution, intensification on Local Original Income.

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Orang lain tidak dapat mendorong dirimu maju, kecuali engkau sendiri yang lebih dahulu mendorong dirimu maju”.

Kupersembahkan :

Kepada orang-orang yang telah memberikan kesempatan padaku untuk menjadi berarti seperti saat ini dan selalu memberi semangat untuk berbuat yang baik

KATA PENGANTAR

Pujidan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulisan tesis yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Perpajakan dan Retribusi Daerah dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Supiori Provinsi Papua, dapat diselesaikan. Penulisan Tesis ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menempuh studi pada Program Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam Penyelesaian tesis ini, penulis tidak dapat memungkiri bahwa masih banyak kekurangan dan/atau ketidaksempurnaan dalam penulisannya baik dari sisi penguasaan permasalahan yang dikaji, teknis penulisan karya ilmiah, bahkan hal kecil sekalipun seperti teknik pengetikan naskah masih ada kekurangan kata dan/atau huruf yang salah, serta kekurangan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, tentu ini semua juga tidak terlepas dari kekurangan dan keterbatasan sebagai manusia yang tidak sempurna. Dalam melakukan proses ilmiah terkait dengan penyelesaian tesis ini sedikit mengalami kesulitan terutama ketika melakukan penelitian, mestiber sabar menyesuaikan dengan kesibukan narasumber. Namun atas suatu upaya dan kerja keras akhirnya penulisan ini dapat terselesaikan. Penulis juga menyadari bahwa penulisan ini dapat diselesaikan karena penulis banyak mendapat bantuan, dorongan, serta petunjuk dari dosen pembimbing, juga berbagai pihak lainnya yang memberikan bantuannya baik moril dan materiil.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. R. Maryanto., MA, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu di UniversitasAtma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Drs. M. Parnawa Putranta, MBA, Ph.D,selaku Direktur Pascasarjana UniversitasAtma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak. B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum, selakuKetua Program Magister Ilmu Hukumyang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UniversitasAtma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak Fredrik Menufandu, Selaku Bupati Kabupaten Supiori yang telah memberikan kesempatan kepada penulis selaku pegawai negeri sipil untuk melaksanakan tugas belajar dan menimba ilmu guna pengembangan aparatur pemerintah di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. BapakDr. W. RiawanTjandra, S.H., M.Hum,selakuDosen Pembimbing Tesis, penulis berterima kasih atas masukan-masukan serta arahan kepada penulis.
6. Bapak Y.Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum,selakuDosen Pembimbing Tesis, penulis berterima kasih atas masukan-masukan serta arahan kepada penulis.
7. Semua dosen dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, atas kerelaan hati Bapak/Ibu dosen untuk mendidik penulis dengan sejumlah pengetahuan hukum, serta terima kasih juga kepada

karyawan Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan-pelayanan yang bersifat administratif.

8. Bapak Benyamin Mansoben, S.H., selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Supiori yang telah membantu memberikan data-data mengenai Perpajakan dan Retribusi Daerah serta informasi mengenai praktek pelaksanaan Peraturan Daerah Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Supiori.
9. Bapak Ronny G. Mamoribo, S.STP, M.Si, selaku Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Supiori yang juga telah memberikan data-data mengenai Perpajakan dan Retribusi Daerah serta informasi mengenai praktek pelaksanaan Peraturan Daerah Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Supiori.
10. BapakIptu Marthen Kafiari, selaku Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja KabupatenSupiori yang telah membantu memberikan data-data terkait dengan permasalahan yang di kaji dalam tesis ini terutama fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Perpajakan dan Retribusi Daerah di Kabupaten Supiori.
11. Rekan-rekan Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum (angkatan tahun 2011) antara lain; Rigo, Thomas, Wahyu, Putri, Sekar, Chandra, Agus, Feri, Egas, Gigusa, Alfred, Sukma, Dian, Bagus, Lusi, Benny, Adi, Ririen, Daniel dan Dian Susanto atas kebersamaan dan kekompakan yang telah terjalin antara kita.

15. Adikku Ketty Arwakon, SE yang telah memberi dukungan materiil dengan memfasilitasiku untuk berangkat ke Yogyakarta guna menimba ilmu pada Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
15. Kedua orang tuaku serta saudara-saudaraku yang juga memotivasi bahkan dengan bantuan materiil yang diberikan kepada penulis sewaktu masih aktif kuliah.
16. Buat istri tercinta (Merry Irarya) dan anak-anakku tersayang (Helen, Randi, Rudi, dan Arianto) yang menjadi inspirasiku, ucapan terima disampaikan atas dukungan doa dan motivasi kalian semua yang diberikan kepada bapa sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini.

Penulis menyadari bahwa tentunya masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini. Oleh sebab itu kritik dan saran semua pihak yang dapat membacanya sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Akhir kata Tuhan melindungi dan memberkati kita semua.

Yogyakarta, Juli 2013

Penulis,

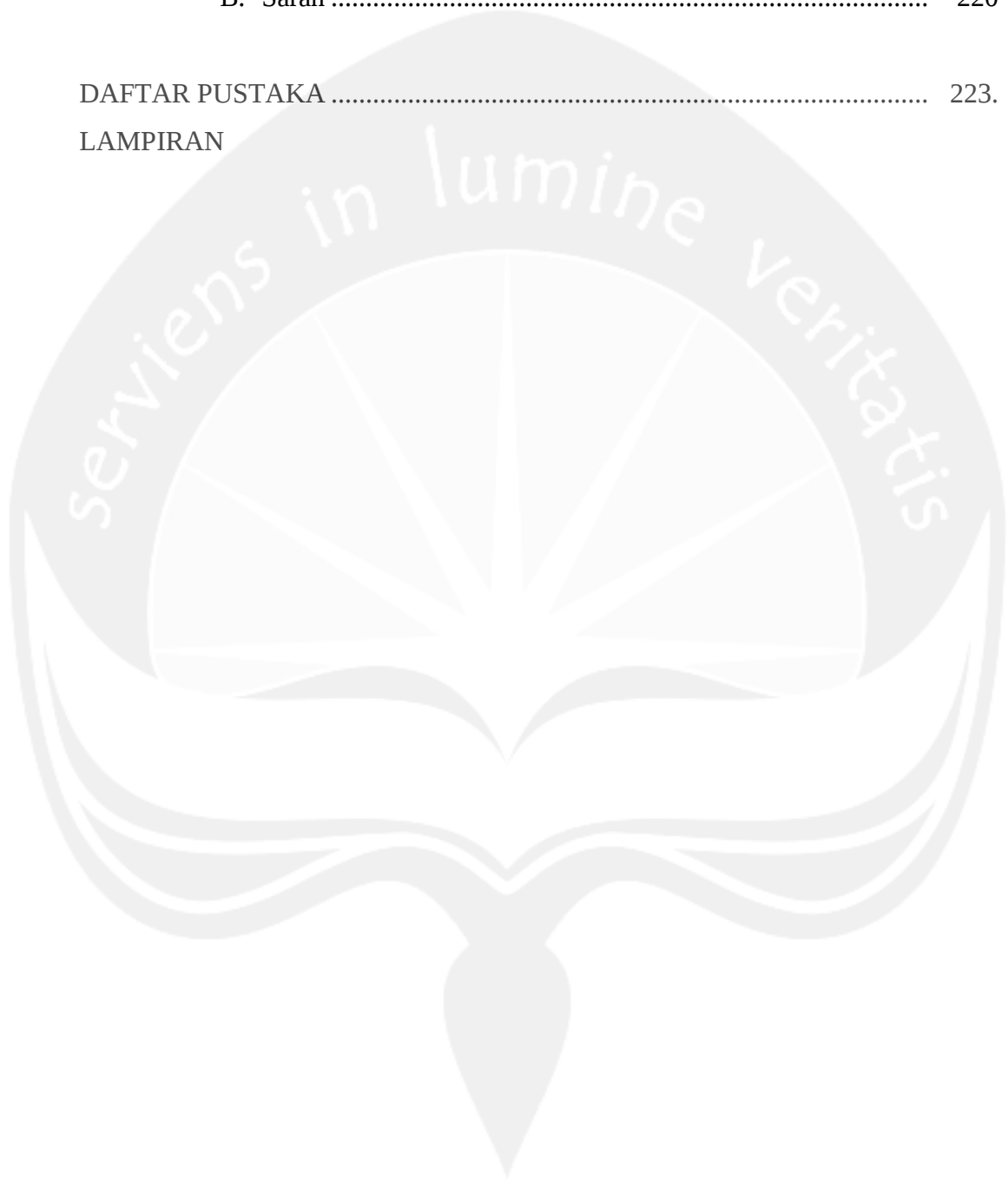
Ari YohanWambrauw

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMANSAMPUL	
HALAMANJUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
INTI SARI.....	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
1. Rumusan Masalah	14
2. Batasan Masalah	15
3. Keaslian Penelitian	17
4. Manfaat Penelitian	28
B. Tujuan Penelitian.....	29
C. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	32
A. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah	32
1. Pengertian Efektivitas	32
2. Pelaksanaan Peraturan Daerah.....	34
B. Perpajakan dan Retribusi Daerah dalam Memperoleh Pendapatan Asli Daerah.....	48
1. Pajak Daerah	50
2. Retribusi Daerah	57
	xii

C. Landasan Teori	67
1. Teori PeraturanP erundang-undangan (<i>Theory of Legislation</i>)	67
2. Teori Otonomi Daerah	76
3. TeoriAsas-AsasUmum Pemerintahan Yang Baik.....	85
4. Teori Negara Kesejahteraan (<i>The Theory of Welfare State</i>)	90
BAB III METODE PENELITIAN	98
A. Jenis Penelitian.....	98
B. Pendekatan Penelitian	98
C. Jenis Data	102
D. Metode Pengumpulan Data.....	105
E. Analisa Data.....	107
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	112
A. Peraturan Daerah Perpajakan dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Supiori dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah	112
1. Pembentukan Peraturan Daerah Perpajakan dan Retribusi Daerah di Kabupaten Supiori	112
2. Pelaksanaan Peraturan Daerah Perpajakan dan Retribusi Daerah di Kabupaten Supiori	126
B. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Supiori dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Perpajakan Dan Retribusi Daerah.....	172
1. KendalaTeoretis	172
2. KendalaYuridis	182
3. KendalaOperasional.....	191
C. Upaya-upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Supiori dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Perpajakan dan Retribusi Daerah.....	197

BAB V	PENUTUP.....	217
	A. Kesimpulan	217
	B. Saran	220
DAFTAR PUSTAKA		223.
LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perbandingan PenelitianTerdahulu (Peneliti I)	19
2. Perbandingan Penelitian Terdahulu (Peneliti II)	21
3. Perbandingan Penelitian Terdahulu (Peneliti III).....	26
4. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2012.....	167

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
- Lampiran 2 Data Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2012